BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan/ memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Tujuan pokok organisasi sektor publik adalah layanan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya (Kuncoro, 2017).

Organisasi sektor publik di Indonesia diwarnai dengan munculnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi publik tersebut, baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Liza dan Yuneita, 2015). Sebagaimana dikutip (Ahyar, 2019).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka pemerintah daerah diharuskan menyusun menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu organisasi/ instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi/ instansi tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2015, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (Simanjuntak, 2019).

Dalam menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan sebuah sistem informasi keuangan daerah diberi nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan aparatnya dalam menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Pasi et al., 2018).

Hal ini juga berlaku di daerah Kota Gorontalo, dalam rangka penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah Kota Gorontalo menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar hukum dalam penggunaan aplikasi SIMDA. Peraturan ini menyatakan bahwa disyaratkan kepada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk keperluan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sehingga diharapkan dapat meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait anggaran yang digunakan dalam satu tahun anggaran.

Namun pada kenyataannya pemerintah daerah Kota Gorontalo masih mengalami beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi SIMDA. Hasil wawancara dengan beberapa pengguna SIMDA di Kota Gorontalo menjelaskan bahwa penerapan aplikasi SIMDA masih kurang efektif dan efisien dalam menyusun laporan keuangan hal ini karena masih banyak pengguna SIMDA yang mengalami kesulitan pada saat mengakses aplikasi SIMDA. Beberapa pengguna SIMDA menyampaikan keluhan mereka ketika menggunakan SIMDA diantaranya: pengguna SIMDA masih mengalami kesulitan untuk mengakses aplikasi SIMDA karena terkendala dengan jaringan, pada pengelolaan data keuangan pengguna SIMDA masih menemukan perbedaan jumlah hasil rekapan antar laporan, pengguna SIMDA mengalami kesulitan pada saat melakukan perbaikan (rollback) karena apabila terjadi kesalahan pada saat penginputan, pengguna akan mengalami kesulitan melakukan perbaikan (rollback) karena semua laporan diinput satu kali (single entry) dan berada dalam satu database.

Kendala lainnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, hal ini karena masih ada pengguna SIMDA yang kurang memahami dan kurang menguasai siklus laporan keuangan. Kurangnya pemahaman terhadap siklus laporan keuangan disebabkan oleh faktor lain yaitu kurangnya user/pengguna SIMDA yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas laporan keuangan agar kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kota Gorontalo tahun anggaran 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun demikian walaupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti tidak bermasalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kenyataannya BPK masih menemukan permasaalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk perlu diperbaiki, diantaranya; Pertama, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri belum melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan. Kedua, Dinas Perhubungan tidak mengelola penerimaan retribusi pengujian kenderaan bermotor secara memadai. Ketiga, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. DR. dr. Aloei Saboe (RSAS) belum memadai dalam mengelola Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). (www.bpk.go.id)

Hasil wawancara dengan Walikota Gorontalo Marten Taha kepada wartawan setelah menerima penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 Senin, 24 Mei 2021 menjelaskan bahwa terdapat dana BOS yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan petunjuk teknis (Juknis) karena dana BOS ini langsung dari APBN ke rekening Kepala Sekolah. Oleh karena itu pemerintah daerah akan menindak lanjuti dimana letak penyimpangan juknis tersebut.

Sama halnya yang diungkapkan Walikota Gorontalo Marten Taha kepada wartawan setelah menerima penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Senin, 24 Mei 2021 menjelaskan bahwa terdapat

dana BOS yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan petunjuk teknis (Juknis) karena dana BOS ini langsung dari APBN ke rekening Kepala Sekolah. Oleh karena itu pemerintah daerah akan menindaklanjuti dimana letak penyimpangan juknis tersebut. (https://gorontalo.bpk.go.id/kota-gorontalo-sabet-wtp-ketujuh/)

Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kota Gorontalo karena pengelolaan dana BOS memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlebih dalam hal penyusunan laporan keuangan ini, pemerintah daerah telah menyerahkan kepada tiap-tiap OPD yang ada di Kota Gorontalo, sehingga lebih memudahkan pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Spencer (1993) dalam (Kuncoro, 2017) kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Selain itu kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Menurut Spencer (1993) bahwa kompetensi juga sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja yang baik dan siapa yang berkinerja kurang baik, diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya manusia tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan, deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) belum maksimal membantu dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini disebabkan SIMDA masih memiliki masalah-masalah dalam penerapannya.

- 2. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, hal ini karena masih ada user/pengguna SIMDA yang berlatar pendidikan sebagai akuntansi.
- 3. Sesuai dengan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo untuk tahun anggaran 2020 , BPK masih menemukan permasaalahan yang perlu untuk diperbaiki diantaranya: Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri belum melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan, Dinas Perhubungan tidak mengelola penerimaan retribusi pengujian kenderaan bermotor secara memadai, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. DR. dr. Aloei Saboe (RSAS) belum memadai dalam mengelola Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo?
- 2. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo?

3. Apakah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo?
- 2. Untuk mengetahui apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo?
- 3. Untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dan sektor publik, dan menjadi reverensi atau masukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukkan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Disamping itu juga pemerintah daerah dapat lebih giat memberikan edukasi terkait penggunaan SIMDA agar Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat lebih memahami tentang penerapan SIMDA.